

ETIKA POLITIK BERBASIS PANCASILA MENUJU TATANAN BERBANGSA YANG HARMONIS

Nailah Fakhirah¹, Agnia Salwa Humanisa², Fais Haydar Yahya³, Zainul Slam⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

¹nailahfakhirah929@gmail.com, ²agniasalwa60@gmail.com ³yatmi.fais@gmail.com

Abstract: Etika politik berbasis Pancasila merupakan dasar etika dan ideologi dalam membangun masyarakat dan bangsa yang beradab. Mengingat situasi politik di Indonesia yang terus berubah serta sering muncul konflik kepentingan, polarisasi, dan penyalahgunaan kekuasaan, penting sekali untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan sistem politik yang adil, demokratis, dan mengutamakan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip etika politik yang berasal dari nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah, dapat digunakan sebagai dasar dalam praktik politik di Indonesia. Metode yang dipakai adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara meneliti literatur dan menganalisis secara normatif terhadap nilai Pancasila dalam konteks etika politik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai Pancasila dalam sikap politik sangat penting untuk menciptakan tatanan yang sehat dan berkeadilan. dapat memperkuat integritas pemimpin, meningkatkan kepercayaan publik, serta membangun harmoni sosial dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, etika politik berbasis Pancasila menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tatanan bangsa yang harmonis, berkeadilan, dan berkeadaban.

Keywords: Etika politik, Pancasila, harmoni bangsa, nilai moral, demokrasi.

Pendahuluan

Pancasila sebagai landasan negara serta cara hidup masyarakat Indonesia memiliki kontribusi penting dalam membangun etika politik yang bermoral. Di tengah dinamika politik yang semakin kompleks mulai dari persaingan kekuasaan, polarisasi sosial, hingga tantangan globalisasi nilai-nilai Pancasila diperlukan sebagai pedoman moral dan arah tindakan politik yang bertanggung jawab. Etika politik berbasis Pancasila tidak hanya menekankan kepentingan kekuasaan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang damai, adil, dan selaras.

Tatanan politik yang harmonis dapat tercipta ketika setiap aktor politik, lembaga negara, dan masyarakat menjadikan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sebagai landasan dalam semua keputusan dan interaksi sosial-politik. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip ini ke dalam praktik politik, rakyat Indonesia dapat membentuk budaya politik yang tidak hanya demokratis, tetapi juga beradab, etis, dan menghormati perbedaan. Oleh sebab itu, analisis tentang etika politik yang berlandaskan Pancasila menjadi krusial untuk memperkokoh identitas bangsa dan melindungi kesatuan negara dalam menghadapi berbagai rintangan zaman.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, politik memegang kontribusi utama dalam mengarahkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik politik di tanah air kerap kali terpengaruh oleh masalah moral, penyalahgunaan wewenang, praktik suap, dan kepentingan pribadi yang mengubah nilai-nilai mulia bangsa. Situasi ini menunjukkan bahwa etika politik masih belum sepenuhnya diterapkan dalam perilaku politik dan pemerintahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan kembali nilai-nilai dasar Pancasila sebagai fondasi etika politik di tingkat nasional. Oleh karena itu, penerapan etika politik yang berlandaskan Pancasila sangatlah krusial dalam menciptakan tatanan berbangsa yang seimbang, demokratis, dan adil. Melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dalam ranah politik, diharapkan bangsa Indonesia dapat mewujudkan kehidupan yang damai, beradab, dan sesuai dengan aspirasinya kemerdekaan.

Dan dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia, Pancasila memiliki peranan yang sangat mendasar sebagai fondasi negara, ideologi nasional, serta panduan moral bagi semua lapisan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya berperan sebagai norma dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga sebagai prinsip etika publik yang memberikan arahan untuk tindakan politik yang beradab dan penuh tanggung jawab. Dalam situasi perkembangan sosial-politik yang terus berjalan, pelaksanaan etika politik yang berlandaskan Pancasila semakin vital untuk memastikan bahwa proses politik berjalan secara sehat, demokratis, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Perkembangan politik nasional pada era modern menunjukkan berbagai tantangan, seperti meningkatnya polarisasi masyarakat, maraknya disinformasi, praktik politik transaksional, dan lemahnya integritas sebagian aktor politik. Fenomena tersebut berpotensi menggerus nilai-nilai kebangsaan dan melemahkan kualitas demokrasi. Dalam kondisi demikian, Pancasila hadir sebagai rujukan etis yang menuntun setiap warga negara, terutama para pemimpin dan penyelenggara negara, untuk menjunjung tinggi nilai Ketuhanan, menghormati martabat manusia, memperkuat semangat persatuan, menegakkan prinsip musyawarah, serta mewujudkan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan politik yang tidak hanya stabil, tetapi juga harmonis dan berkarakter kebangsaan.

Etika politik berbasis Pancasila mendorong terciptanya budaya politik yang santun, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan persatuan, politik tidak lagi dipandang sebagai arena pertarungan kepentingan yang menghalalkan segala cara, melainkan sebagai sarana mulia untuk mencapai kemaslahatan bersama. Melalui prinsip kerakyatan dan musyawarah, setiap keputusan politik diharapkan lahir dari proses yang demokratis, dialogis, dan menghargai keberagaman pandangan. Pada akhirnya, keadilan sosial menjadi tujuan utama dari seluruh proses politik, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara merata dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai etika politik berbasis Pancasila menjadi sangat relevan dalam upaya memperkuat ketahanan nasional dan membangun peradaban

politik yang memiliki martabat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam dunia politik, Indonesia dapat bergerak menuju masyarakat yang seimbang, adil, serta mampu mengatasi beragam tantangan internasional sambil tetap mempertahankan identitas dan karakter bangsa.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menerapkan metode penelitian yang berfokus pada sumber-sumber tertulis. Pendekatan tersebut dipilih untuk menampilkan dan mengevaluasi penerapan etika politik yang berlandaskan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa. Informasi dikumpulkan dari berbagai referensi seperti dokumen resmi, artikel, jurnal akademik, dan buku yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan pengumpulan dokumen. Analisis data mengadopsi analisis isi untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila yang berkaitan dengan etika politik serta penerapannya dalam sistem politik Indonesia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya etika politik berbasis Pancasila dalam mewujudkan tatanan bangsa yang harmonis.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi nilai Pancasila dalam praktik politik

Berdasarkan pendapat (Ruslan, dalam Sabilla Febriany & Anggraeni Dewi, 2021), Pancasila adalah suatu pemikiran yang berfungsi sebagai landasan bagi Rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan sebagai bangsa dan negara. Setiap bagian dari nilai-nilai Pancasila merupakan pengembangan dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Pancasila merupakan fondasi bagi negara Indonesia yang berfungsi sebagai landasan untuk pembangunan serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila, beserta nilai-nilainya, berperan sebagai dasar pemikiran, sikap dari masyarakat, landasan negara, ideologi, dan kekuatan yang menyatukan bangsa. Ini juga menjadi sumber hukum negara. Kita, sebagai warga Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan cara yang berkelanjutan, seiring waktu dan antar generasi, sehingga pelestarian serta budaya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud. Memilih Pancasila sebagai fondasi negara sangatlah penting untuk menjaga keberadaan bangsa Indonesia, karena setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur bangsa yang sesuai dengan identitas bangsa dan negara itu sendiri.

Pelaksanaan merujuk pada tindakan atau realisasi dari suatu rencana, ide, atau kebijakan menjadi nyata. Di Indonesia, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pertumbuhan partai politik dan proses pemilu menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dimasukkan dalam peraturan, praktik politik, serta keikutsertaan masyarakat dalam demokrasi, termasuk dalam pemilu. Ini mencakup berbagai elemen seperti penerapan nilai Pancasila dalam regulasi pemilu, kampanye yang menekankan kesatuan,

dan partisipasi masyarakat dalam pemilu sebagai bentuk dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam perkembangan politik dan pemilihan umum di Indonesia agar semua proses politik dan demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara. Di Indonesia, pemilihan umum adalah salah satu perubahan dari sistem demokrasi yang diterapkan oleh negara, sesuai dengan maksud dari sila keempat Pancasila. (Kristiani Situmorang et al., 2024)

a) musyawarah mufakat vs politik polarisasi

Musyawarah mufakat adalah sebuah prinsip dasar dalam kultur politik Indonesia yang telah diterapkan sejak masa pra-kemerdekaan (Hatta, 2018). (*Pancasila Musyawarah.Pdf 4*, n.d.) Dalam konteks Pancasila, musyawarah untuk mufakat tidak hanya merupakan mekanisme teknis pengambilan keputusan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis tentang kesetaraan, dialog, dan pencarian kebenaran bersama (Notonagoro, 2017) Implementasi musyawarah mufakat dalam sistem politik modern menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait efisiensi dan kompleksitas isu kontemporer (Setiawan & Santoso, 2018). Namun, nilai-nilai dasarnya tetap relevan sebagai antitesis dari politik kompetitif yang cenderung menghasilkan konflik (Prasetyo, 2021). Musyawarah mufakat atau musyawarah dan mufakat merupakan salah satu prinsip dari lima sila Pancasila yang terkait dengan sistem demokrasi di Indonesia. Untuk menjelaskan konsep musyawarah-mufakat dalam sistem nilai Pancasila, perlu dijelaskan prinsip-prinsip lain karena prinsip-prinsip tersebut saling terhubung satu dengan yang lainnya. Setiap prinsip mendasari prinsip lainnya dan menghasilkan sebuah kesatuan. Dalam konteks ini, ideologi negara Pancasila menjadikan Indonesia sebagai suatu bangsa yang memiliki karakteristik unik.

Polarisasi politik adalah isu yang muncul di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Ciri khas dari polarisasi politik adalah adanya perbedaan pandangan yang mencolok antara kelompok-kelompok politik, sehingga konsensus menjadi sulit dicapai. Polarisasi politik bisa memberikan dampak buruk bagi masyarakat, seperti meningkatnya ketegangan sosial, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta terhambatnya proses pembangunan.

Polarisasi memiliki arti sebagai pembagian dalam dua kelompok di bagian atas terdiri dari orang-orang yang memiliki sudut pandang serta kepentingan yang saling bertentangan. Dalam konteks yang berbeda, polarisasi politik merujuk pada dua kelompok yang memiliki ideologi dan pandangan berbeda terkait politik. Tidak bisa dipungkiri bahwa istilah polarisasi, bila diartikan sebagai perbedaan pandangan atau opini, menjadi suatu hal yang niscaya, nyata adanya, dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan bersosial. (Fathurochman & Tutiasri, n.d.)

b) ketuhanan dan moralitas pejabat public

Etika dalam sistem pemerintahan saat ini menjadi topik yang sering diperbincangkan sehubungan melalui usaha untuk membentuk karyawan yang kompeten

dan jujur. Salah satu keadaan yang terlihat belakangan ini adalah banyak pejabat publik dan birokrat yang sering kali tidak mengindahkan aturan saat menjalankan tugas mereka. Dalam hubungan antara pemerintah dan etika serta sikap karyawan dalam melaksanakan kewajiban, etika dapat dilihat dari beberapa peran penting pemerintah, yaitu memberikan pelayanan, melakukan pengaturan atau regulasi, dan memberdayakan masyarakat. Poin utama etika dalam pemerintahan adalah bahwa tindakan para pejabat harus mengikuti aturan yang ada, dan menyadari kewajiban mereka untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, moral pada umumnya berfungsi untuk mengatur cara orang bertindak, sehingga hubungan ini tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan etis. Anggota lembaga pemerintahan harus mempertimbangkan evaluasi moral. Secara singkat, pentingnya pemahaman tentang etika, terutama bagi pemimpin di sektor pemerintahan, sangat vital untuk keberhasilan operasional pemerintahan serta akuntabilitas dan penerimaan masyarakat.

c) kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kebijakan public

Kemanusiaan merupakan kunci utama dalam membangun sebuah bangsa atau negara. Kemanusiaan juga menjadi salah satu dasar untuk membangun relasi antar individu dalam masyarakat. Konsep kemanusiaan yang termaktub dalam pancasila bersifat universal, artinya berlaku bagi setiap individu dan semua bangsa. Kemanusiaan yang bersifat universal dapat dijadikan sebagai dasar kebangsaan sekaligus nasionalisme, dengan kata lain kemanusiaan tersebut melibatkan seluruh dimensi manusia bukan chauvinisme, yakni yang memiliki sifat fanatisme yang terlalu berlebihan terhadap keyakinan atau bangsa. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebenarnya menjelaskan tentang manusia sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam berperilaku harus dilakukan dengan benar sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku, agar nilai-nilai itu tetap mencerminkan makna yang sesungguhnya. (Benediktus Josua Gea et al., 2025)

Berdasarkan pendapat Gesmi dan Hendri, prinsip kemanusiaan yang adil serta beradab memiliki beberapa makna utama, antara lain:

1) kemanusiaan

Asal-usul istilah manusia merujuk pada makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Agung. Sang Pencipta memberikan manusia baik tubuh maupun jiwa, yang keduanya bersatu membentuk harmoni yang dikenal sebagai identitas manusia.

2) adil

Adil memiliki makna yang berlandaskan pada kebenaran. Contohnya, ketika Kita memberikan sesuatu kepada orang lain karena itu adalah hak mereka. Kita harus bersikap netral dan tidak memihak, serta tidak bersikap diskriminatif.

3) beradab

Beradab merupakan istilah yang Kata adab berasal dari yang berarti budaya. Jadi, berarti memiliki budaya adalah berada. Seorang individu yang beradab adalah orang yang perilakunya selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya merupakan aspek-aspek yang dihargai oleh manusia dan karena keagungannya, nilai-nilai ini menjadi panduan, ukuran, dan petunjuk untuk diikuti. Jika sesuai, maka hal itu dianggap baik; jika tidak diikuti, berarti hal itu dianggap tidak baik. (Penelitian Dan Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan et al., 2023)

Tantangan dan solusi etika politik di era kontemporer

Menurut (Winarso, 2021) pengertian tantangan merujuk pada sesuatu yang berfungsi sebagai stimulus bagi kemampuan individu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebuah tantangan didefinisikan sebagai elemen atau fenomena yang mampu mendorong semangat untuk memperbaiki kemampuan dalam mengatasi masalah atau kesulitan, yang pada gilirannya memacu seseorang untuk berusaha lebih keras dan sejenisnya. Di sisi lain, Rollings mendefinisikan tantangan sebagai persaingan dan rintangan yang ditemui dalam suatu aktivitas. Selain itu, tantangan juga bisa dimaknai sebagai media pembelajaran berbasis digital atau objek yang memiliki potensi untuk mendorong semangat dalam memperbaiki kemampuan menghadapi permasalahan. (Rahmiati et al., 2024)

Mengenai pendekatan penyelesaian, diagram alur dibagi menjadi tiga kelompok: darurat/permukaan/jangka pendek, tanggung/jangka menengah, dan dasar/jangka panjang. Jika analisis penyebab hanya berhenti di permukaan, maka solusinya juga akan bersifat dangkal. Politik masa kini mengacu pada praktik dan kondisi politik yang terjadi saat ini. Ini melibatkan berbagai aspek kehidupan politik yang menunjukkan kemajuan terbaru dalam masyarakat, teknologi, dan geopolitik. Politik saat ini tidak hanya fokus pada level nasional, tetapi juga meliputi hubungan internasional, masalah global, serta respons terhadap perubahan-perubahan besar di dunia. (Marwiyah et al., 2022).

Di dunia politik sekarang ini, ada banyak tren dan isu penting seperti globalisasi, masalah lingkungan, ketidakadilan sosial, hak asasi manusia, dan perkembangan teknologi. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi cara penyusunan kebijakan, cara pembagian kekuasaan, dan cara orang berpartisipasi dalam politik. Sistem politik saat ini melibatkan berbagai bentuk pemerintahan, dari demokrasi hingga rezim otoriter, serta berisi aktor seperti pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan individu. Interaksi yang kompleks ini juga menunjukkan tantangan global yang dihadapi pemerintah dalam menjaga stabilitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keadaan politik saat ini mencerminkan kondisi yang terus berubah dan beradaptasi dengan kemajuan zaman, teknologi, dan perubahan masyarakat di tingkat global. (Fauzan Giyandri et al., 2024)

Dalam mengarungi Dalam dinamika politik masa kini, peran dan kekuatan Pancasila sebagai dasar etika politik sering kali dipertanyakan. Arus globalisasi, beragamnya ideologi, pesatnya perkembangan teknologi informasi, serta tantangan

internal seperti korupsi, intoleransi, dan polarisasi politik semakin memperumit upaya untuk menegakkan serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik politik sehari-hari.

a) Etika politik di era digital

Etika politik berfungsi sebagai sarana membina hubungan yang harmonis antara para pelaku politik, kekuatan sosial politik, serta berbagai kelompok kepentingan perlu diwujudkan dengan tujuan mendorong kemajuan bangsa dan negara secara maksimal, sambil tetap mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Media digital adalah sarana penyampaian pesan yang menggunakan teknologi berbasis digital (komputer, internet, smartphone, dan perangkat lainnya) sehingga informasi dapat diakses, disimpan, diproduksi, dan disebarluaskan dengan cepat. (Kaka et al., 2025) Tantangan etika dalam politik di era digital terletak pada meningkatnya polarisasi politik. Media sosial seringkali memperkuat ruang gema, kondisi ini membuat pengguna hanya menerima pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, sehingga memperdalam polarisasi dan melemahkan kemampuan untuk berdialog secara terbuka di antara berbagai pendapat. Studi ini mbingkai ulang peran generasi muda dalam konteks digital, menyoroti pentingnya etika digital dalam aktivitas politik, dan mengeksplorasi potensi pemanfaatan media sosial berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik di kalangan generasi muda, sekaligus menjadi wadah bagi interaksi politik yang menuntut penerapan etika dalam kehidupan digital dengan fokus pada aktivitas politik anak muda di media sosial. Dalam konteks transformasi komunikasi politik, teknologi digital telah memperluas partisipasi anak muda dalam proses politik, memungkinkan mereka mengakses informasi dan menyampaikan pendapat secara langsung. Namun, tantangan seperti penyebaran berita palsu dan isu privasi juga muncul, yang menuntut kesadaran etika dari pengguna. (Laowe, n.d.)

b) Demokrasi dan keadilan hukum

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk turut menetapkan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Secara bahasa, istilah “demokrasi” berasal dari Yunani, dari kata *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu wilayah, serta *cratein* atau *cratos* yang bermakna kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan kedua kata tersebut menggambarkan suatu bentuk pemerintahan di mana kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan tertinggi didasarkan pada kehendak bersama, dan kekuasaan dijalankan oleh serta untuk rakyat baik secara terminologi maupun konsep, dapat diungkapkan oleh Joseph A.

Jika ditilik dari etimologinya, istilah Kata “keadilan” berasal dari istilah Arab *al-‘adl*, yang bermakna kejujuran hati, keteguhan dalam menahan hawa nafsu, serta kemampuan menilai sesuatu secara benar, seimbang, dan setara. Dalam bahasa Indonesia,

keadilan diartikan sebagai sikap tidak memihak, berpegang pada kebenaran, bertindak secara proporsional, dan menjauhi tindakan sewenang-wenang. Secara etimologis, keadilan menggambarkan suatu keadaan ideal secara moral yang mencerminkan kebenaran dalam memperlakukan sesuatu, baik terhadap individu maupun benda. Konsep keadilan sosial (social justice) memiliki perbedaan dengan keadilan hukum, politik, atau ekonomi, namun semua bentuk keadilan tersebut sama-sama memiliki peran penting dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis. Namun, konsep keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan masalah moral dalam masyarakat yang bervariasi antara satu budaya dan budaya lainnya. Konsep ini mencakup semua ide mengenai keadilan yang pada akhirnya mengarah kepada pemahaman tentang Keadilan sosial merupakan bentuk keadilan yang berlaku di tengah masyarakat dan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik materiil maupun spiritual. Prinsip ini menekankan pemerataan hak, kesempatan, dan kesejahteraan bagi setiap individu agar tercipta keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan bersama.

c) Pendidikan etika politik bagi generasi muda

Pendidikan politik memiliki asal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu Political socialization, yang bahwa proses pendidikan ini menjadi salah satu bentuk dari sosialisasi politik bahwa pendidikan ini merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik berperan penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi pemilih muda. Pendidikan ini dapat dipahami sebagai usaha untuk meningkatkan wawasan warga negara agar dapat terlibat secara penuh dalam sistem politik. Fokus pendidikan politik bukan hanya pada pengetahuan mengenai sistem pemerintahan, tetapi juga melibatkan partisipasi secara aktif dan perilaku warga negara dalam proses demokrasi. (Siti Utami & Wahidin, 2025)

Pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi muda agar memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Kelompok muda selalu menjadi perhatian di setiap zaman. Eksistensi generasi ini tidak dapat dipisahkan dari perubahan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan suatu negara. Di Indonesia, hampir setiap fase revolusi sosial dan politis selalu diisi dan melibatkan kaum muda. Misalnya, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menjadi momentum penting bagi kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian, revolusi kemerdekaan tahun 1945 juga didukung secara signifikan oleh generasi muda, khususnya selama masa perjuangan fisik. (Prasetyo et al., n.d.)

Upaya Mewujudkan Kehidupan Bangsa yang harmonis

Indonesia, sebagai sebuah negara yang terdiri dari banyak pulau, memiliki berbagai macam suku, tradisi, bahasa, dan keyakinan yang menjadi ciri khas nasional serta sumber daya bangsa. Identitas bangsa, yang terlihat dalam Pancasila dan motto Bhinneka Tunggal Ika, berperan penting dalam menjaga persatuan di tengah masyarakat multikultural. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai identitas nasional melalui pendidikan dan media sosial menjadi strategi kunci dalam membangun karakter bangsa yang harmonis dan berkeadilan. Nilai dari pendidikan agama yang bersifat

moderat di Indonesia berasal dari keragaman dan nuansa multikultural yang dimilikinya. Bangsa ini terdiri dari berbagai suku, tradisi, keyakinan, dan komunitas. Variasi dan keanekaragaman ini mengharuskan adanya pemisahan, yang bisa menyebabkan pertikaian dan ketimpangan sosial.

Harmoni sosial adalah kondisi di mana terdapat kesesuaian, keseimbangan, keadilan, dan kecocokan yang menciptakan rasa aman serta ketentraman dan kesejahteraan bagi semua manusia. Ini berarti menjalin persaudaraan dan kebersamaan antara berbagai agama meskipun terdapat perbedaan suku, ras, dan kelompok. Penelitian ini mengungkapkan bahwa di desa Janjimatogu dan Lambou Dahrul Ihsan, setiap agama mengajarkan pentingnya hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Kesadaran pemeluk agama yang tinggi mempermudah terciptanya harmoni sosial dalam masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat hidup dengan tenang, saling membantu, dan saling menghormati dalam aktivitas sehari-hari. (*RISOMA+Vol+2+no+6+Nov+2024+hal+10-20*, n.d.)

a) Peran masyarakat sipil dalam mengawali etika politik

Masyarakat sipil adalah sebuah konsep yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai sekarang masih menjadi bahan diskusi serta argumen yang mendalam. Sepanjang perkembangannya, muncul berbagai pandangan yang mencoba memberikan definisi mengenai "masyarakat sipil".

Etika Politik diharapkan dapat menjadi cara untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara para pelaku, kekuatan politik sosial, dan komunitas kepentingan lainnya untuk meraih kemajuan optimal bagi negara dan bangsa. Ini dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu dan kelompok (Kosasih, 2023). Keberadaan etika dalam politik sangat krusial untuk kemajuan dalam kehidupan berpolitik. Prinsip-prinsip etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengedepankan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kepemimpinan yang baik, semangat olahraga, kedisiplinan, etos kerja yang tinggi, kemandirian, sikap toleran, rasa malu, serta pemeliharaan kehormatan dan martabat sebagai warga negara.

Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam pembangunan nasional. Mereka bertindak sebagai penyalur aspirasi masyarakat, pengawas pemerintah, pelopor inovasi sosial, dan penyedia layanan publik. Dengan mendorong partisipasi masyarakat, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, dan mengadvokasi kebijakan publik yang responsif, masyarakat sipil berkontribusi signifikan terhadap pembangunan sosial, ekonomi, dan politik yang inklusif dan berkelanjutan.

b) Membangun budaya politik kekeluargaan dan gotong royong

Kehidupan dalam masyarakat manusia selalu melibatkan interaksi sosial antara individu. Di Indonesia, salah satu tradisi yang unik adalah gotong royong. Budaya gotong royong adalah sebuah ide yang sangat terkait dengan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai komunitas agraris. Oleh karena itu, gotong royong memiliki nilai yang sangat tinggi.

Terdapat tiga konsep dalam gotong royong. Pertama, manusia tidak hidup sendirian di dunia ini, melainkan dikelilingi oleh komunitas, masyarakat, dan juga lingkungan sekitar. Kedua, dalam semua aspek kehidupan, manusia secara mendasar bergantung pada orang lain. Ketiga, hubungan yang baik antar sesama didorong oleh rasa saling memiliki dan empati. Maka dari itu, dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk ada kerjasama dan sikap gotong royong dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Kehilangan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat dapat menyebabkan perpecahan dan melemahnya persatuan di antara warga Jakarta. Oleh sebab itu, penting untuk membangkitkan kembali budaya kerja sama yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Apabila perpecahan dan kemungkinan gesekan sosial terus berlangsung, hal ini akan mengancam Ketahanan Nasional. Inilah alasan mengapa Budaya Gotong Royong sangat diperlukan untuk menghadapi dampak negatif dari Globalisasi di masyarakat. (Dasa et al., 2022)

c) Keteladanan pemimpin dalam menegaskan etika

Salah satu masalah krusial dalam Pendidikan di Indonesia saat ini berfokus pada peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan mutu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya sarana fisik yang sesuai dan mutu tenaga pengajar.

Tugas ini bukan hanya sekadar administratif, melainkan juga mencakup dimensi spiritual dan moral. Para pemimpin dalam institusi pendidikan Islam diharapkan untuk menjalankan peran mereka berdasarkan etika yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta contoh dari Nabi Muhammad SAW. Karakter kepemimpinan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi tantangan kepemimpinan di masa kini. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, keadilan, musyawarah dan teladan memiliki dampak langsung terhadap efektivitas dan legitimasi kepemimpinan dalam institusi pendidikan Islam. (Fatma et al., n.d.)

Ciri-ciri kepemimpinan yang diidentifikasi mencakup spiritualitas, integritas, keadilan, ketekunan, ketegasan, dan empati. Pengaruh penggabungan etika dalam kepemimpinan tampak dalam tindakan dan dimensi akademis. Proses ini berdampak pada orang lain melalui penerapan kepemimpinan yang beretika, selaras dengan standar etika yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kualitas pengajaran untuk meraih tujuan bersama institusi. Dengan demikian, nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas sekolah dapat tetap dijaga sambil memperbaiki kualitas pendidikan. (Yulia Rahayu et al., 2024)

Kesimpulan

Etika politik berbasis Pancasila merupakan pedoman moral yang sangat penting dalam membangun kehidupan politik yang berkeadaban dan berkeadilan di Indonesia. Dalam situasi politik yang sering diwarnai oleh kepentingan pribadi dan penyimpangan nilai, penerapan prinsip-prinsip Pancasila menjadi solusi untuk mengembalikan makna sejati dari kekuasaan sebagai sarana pengabdian kepada rakyat. Nilai-nilai seperti

persatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan sosial, dan ketuhanan perlu ditanamkan dalam sikap para pemimpin dan masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan kehidupan politik yang demokratis, jujur, dan harmonis. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar etika dalam setiap tindakan politik, Indonesia dapat mewujudkan tatanan berbangsa yang damai, adil, dan beradab. Etika politik yang bersumber dari Pancasila tidak hanya memperkuat integritas pemimpin, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan publik serta mempererat persatuan nasional.

Daftar Pustaka

- Arif Hakim Batubara, A., Salsabila Ginting, C., Amalia, M., & Ramadhan Nasution, M. (n.d.). Etika Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam: Teladan Nabi Sebagai Fondasi Integritas Pemimpin Modern. In *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 5).
- Benediktus Josua Gea, Despri Mariyani Siahaan, Rupma Riana Saragih, Susi Krisdayanti Marbun, Yohana Sinurat, & Ramsul Nababan. (2025). Analisis Penerapan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Mengatasi Isu Kesenjangan Sosial Ekonomi Dunia Pendidikan pada Masyarakat Perkotaan Modern. *Jurnal Yudistira : Publikasi Riset Ilmu Pendidikan Dan Bahasa*, 3(2), 187–195. <https://doi.org/10.61132/yudistira.v3i2.1767>
- Dasa, D., Dasa Permana, D., Legowo, E., Suwarno, P., Widodo, P., Risma, H., Saragih, J., & Aris, T. (2022). Globalisasi dan Lunturnya Budaya Gotong Royong Masyarakat DKI Jakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Fathurochman, N. Y., & Tutiasri, R. P. (n.d.). *Penerimaan Generasi Z terhadap Polarisasi Politik*. <http://Jiip.stkipyapisdompou.ac.id>
- Fatma, N., Batubara, H., Hannum, S., Lubis, S. S., & Sofhan, A. (n.d.). *EDUCAZIONE: Jurnal Multidisiplin Lembaga Penelitian Dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Yayasan Almahmudi Bin Dahlan Website: <https://j-educa.org/index.php/educazione> Karakter Kepemimpinan Rasulullah Saw Sebagai Model Bagi Pemimpin Muslim Masa Kini*. <https://j-educa.org/index.php/educazione>
- Fauzan Giyandri, T., Bungaran, J., & Sinaga, B. (2024). Tantangan dan Dinamika Penerapan Teori Politik Kontemporer di Indonesia. *JIHHP*, 4(3). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3>
- Kaka, M. A., Hati Zebua, S., Avni Bahagia, Y., Lisa, R. F., Puja, A., Studi, P., Pancasila, P., Kewarganegaraan, D., Keguruan, F., & Pendidikan, I. (2025). Penggunaan Media Digital sebagai Alat untuk Meningkatkan Literasi Kewarganegaraan dan Etika di Kalangan Remaja. *TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)*, 2(2), 116–123.
- Kristiani Situmorang, L., Khalisha Khairiyah, T., Ayuningsih, P., Edelweiska, R., Yulyanti, P., & Husna, Z. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perkembangan Partai Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(21), 458–469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14487848>
- Laowe, S. S. (n.d.). *TANTANGAN ETIKA POLITIK DALAM ERA DIGITAL: PERSPEKTIF SOSIAL DAN TEKNOLOGI*. *pancasila musyawarah.pdf 4*. (n.d.).
- Penelitian Dan Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, J., Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dalam Berbagai Profesi Di Lingkungan Masyarakat Kota Jambi Nurmalia Dewi, I., Lukman Hakim, M., Utami, S., & Ichsan, M. (2023). *SEMAYO* (Vol. 1, Issue 1).
- Prasetyo, K. B., Putri, N. A., & Pramono, D. (n.d.). *BAB I. PENDIDIKAN POLITIK GENERASI MUDA MELALUI GERAKAN VOLUNTARISME KOMUNITAS MILENIAL*. <https://doi.org/10.1529/kp.v1i3.48>
- Rahmiati, D., Kasmawati, Mp., Yustira Lestari Wahab, A., Andri Kurniawan, Mp., & Arie Pratama, F. (2024). *MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS DIGITAL Editor*. <https://arradpratama.com/RISOMA+Vol+2+no+6+Nov+2024+hal+10-20>. (n.d.).

Siti Utami, I., & Wahidin, D. (2025). Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. In *Maret* (Vol. 18, Issue 2). www.plus62.isha.or.id/index.php/abdimas

Yulia Rahayu, E., Rahmi, A., Buana Surabaya, A., & Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, U. (2024). INTEGRASI ETIKA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM Mendukung Pembinaan Guru di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Pendidikan*, 10(1), 2548–4419. <https://doi.org/10.55210/attalim.v9i1.886>